

**PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : 455 / KSB / BPKAD / VIII / 2022

NOMOR : 16 / DPRD / VIII / 2022

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**NOMOR : 455 / KSB / BPKAD / VIII / 2022
NOMOR : 17 / DPRD / VIII / 2022**

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2022

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. APRIYADI**
Jabatan : Pj. Bupati Musi Banyuasin
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Wahid Udin No. 258 Sekayu

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

2. a. Nama : **Sugondo**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Wahid Udin No. 258 Sekayu
- b. Nama : **Jonkenedi**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Wahid Udin No. 258 Sekayu
- c. Nama : **Irwin Zulyani, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Wahid Udin No. 258 Sekayu
- d. Nama : **Endi Susanto, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Alamat Kantor : Jl. Kolonel Wahid Udin No. 258 Sekayu

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Proritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Sekayu, 9 Agustus 2022

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

selaku
PIHAK PERTAMA



H. APRIYADI

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

selaku
PIHAK KEDUA

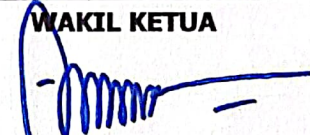


**SUGONDO
KETUA**



**JONKENEDI
WAKIL KETUA**

**IRWIN ZULYANI, SH
WAKIL KETUA**



**ENDI SUSANTO, SE
WAKIL KETUA**

Lampiran : Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD

Nomor : 455 /KBS/BPKAD/VIII/2022

Nomor : 17 /DPRD/VIII/2022

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RINGKASAN STRUKTUR KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN	RANCANGAN KUA PPAS 2023	HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KET
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.799.518.902.000,00	2.939.518.902.000,00	140.000.000.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	382.551.175.000,00	382.551.175.000,00	-	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.416.585.715.000,00	2.556.585.715.000,00	140.000.000.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	382.012.000,00	382.012.000,00	-	
5	BELANJA	2.688.680.652.297,00	2.843.028.480.768,00	154.347.828.471,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	110.838.249.703,00	96.490.421.232,00	(14.347.828.471,00)	
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	140.838.249.703,00	126.490.421.232,00	(14.347.828.471,00)	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan (Pilkada Serentak 2024)	24.000.000.000,00	4.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.000.000.000,00	31.652.171.529,00	5.652.171.529,00	
	- PT. Bank Sumsel Babel	5.000.000.000,00	3.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	
	- PDAM	15.000.000.000,00	20.152.171.529,00	5.152.171.529,00	
	- Petro Muba Holding	5.000.000.000,00	7.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
	- Muba Energi Maju Berjaya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	90.838.249.703,00	90.838.249.703,00	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	(110.838.249.703,00)	(96.490.421.232,00)	14.347.828.471,00	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	
	TOTAL RANCANGAN APBD	2.829.518.902.000,00	2.969.518.902.000,00	140.000.000.000,00	

Sekayu, 9 Agustus 2022

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

Selaku

PIHAK PERTAMA

H. APRIYADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Selaku

PIHAK KEDUA

SUGONDO
KETUA

JONKENEDI
WAKIL KETUA

IRWIN ZULYANI, S.H
WAKIL KETUA

ENDI SUSANTO, S.E
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI
KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
1.1	LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2	TUJUAN.....	I-7
1.3	DASAR HUKUM.....	I-8
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	II-1
2.1	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	II-2
2.1.1	KONDISI EKONOMI DAERAH	II-3
2.1.2	TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2023	II-12
2.1.2.1	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DI LUAR KABUPATEN MUSI BANYUASIN.....	II-13
2.2	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	II-15
2.2.1	PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN.....	II-18
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III-1
3.1	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN	III-1
3.1.1	ASUMSI INFLASI.....	III-3
3.1.2	ARAH KEBIJAKAN FISKAL	III-4
3.1.3	LAIN – LAIN ASUMSI	III-7
3.2	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD	III-8
3.2.1	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM RAPBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN TA 2023.....	III-9
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN, PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2023	IV-1
4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH	IV-5
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1 KEBIJAKAN TERKAIT PERENCANAAN BELANJA.....	V-1
5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.....	V-6
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI-1
6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI-2
6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-9
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	VII-1
7.1 STRATEGI PENCAPAIAN EKONOMI MAKRO DAERAH.....	VII-1
7.2 STRATEGI PENCAPAIAN ASUMSI PENYUSUNAN APBD.....	VII-7
7.3 LANGKAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	VII-24
7.4 LANGKAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	VII-26
7.5 ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VII-32
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Muba- Provinsi-Nasional Tahun 2017 - 2021	II-3
Tabel 2.2 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Periode 2017-2021	II-5
Tabel 2.3 PDRB ADHB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021	II-7
Tabel 2.4 PDRB ADHK Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 - 2021	II-9
Tabel 2.5 Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin	II-11
Tabel 3.1 Gambaran Ekonomi Makro Nasional 2022 - 2023	III-3
Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 – 2021 dan Tahun 2022 Per 31 Mei 2022	IV-2
Tabel 4.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023	IV-4
Tabel 5.1 Realisasi Belanja Tahun 2019 – 2020	V-2
Tabel 5.2 Realisasi Belanja Tahun 2021	V-3
Tabel 5.3 Realisasi Belanja Tahun 2022	V-4
Tabel 5.4 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	V-47

Tabel 6.1	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2021 dan Per 31 Mei Tahun 2022	VI-8
Tabel 6.2	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2021 dan Per 31 Mei Tahun 2022	VI-17
Tabel 6.3	Rancangan Pembiayaan Daerah Tahun 2023	VI-19
Tabel 7.1	Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	VII-2
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kab. Muba Tahun 2023	VII-4
Tabel 7.3	Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	VII-6
Tabel 7.4	Sasaran Program Prioritas Kab. Muba Tahun 2023	VII-8
Tabel 7.5	Target Pembiayaan Daerah Tahun 2023	VII-34
Tabel 7.6	Ringkasan Struktur Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023	VII-35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD sendiri merupakan rencana kerja tahunan daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut setiap pemerintah daerah wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum APBD (KUA) pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah disusun



dengan memperhatikan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum APBD ini tetap memperhatikan dan mengacu pada agenda pembangunan nasional, kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah. Penentuan program prioritas pembangunan tetap memperhatikan program prioritas pemerintah pusat dan program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu program prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 merupakan hubungan yang tidak terpisahkan/sinergi dengan program prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rangka meningkatkan sinergitas pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 tidak lepas dari isu atau kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan. Sebelum menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023, maka perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMN.



Guna mewujudkan visi pembangunan nasional 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, dirumuskan 9 Misi Pembangunan berdasarkan Peraturan **Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 meliputi:**

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Strategi Pembangunan Nasional yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional disajikan pada Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024.

Isu strategis yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 tidak terlepas dari Tema Pembangunan Nasional Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Produktivitas untuk**



Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 7 (tujuh) **Prioritas Nasional** sebagai berikut:

- (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- (5) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Program Prioritas RKP Nasional tersebut dijabarkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 yaitu **“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”**. Untuk mencapai target-target tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial,
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi,



3. Pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang,
4. Reformasi birokrasi dan stabilitas daerah.

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 disusun secara simultan baik proses maupun perumusan substansinya dengan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD).

Berpedoman pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026, RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, serta Tema dan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023. RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 mengusung Tema **“Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi dan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan”** dengan 4 (empat) Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Angka Kemiskinan;



2. Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi;
3. Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial. Pendekatan holistik - tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau



permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 adalah untuk menyusun gambaran kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD Tahun Anggaran 2023. Selain itu, penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023 memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. **Kebijakan Umum APBD Tahun 2023** memuat alokasi sumber daya yang terukur baik secara rasional pada sektor pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah kedalam suatu dokumen perencanaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023 menjadi landasan bagi penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA)



Perangkat Daerah Tahun 2023 hingga ke Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023. Implementasi RKPD tidak hanya akan didanai oleh keuangan daerah, namun juga didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Dasar hukum penyusunan KUA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



- 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 590);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);



26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
28. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah



Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik;
32. Peraturan Bupati Nomor 270 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 270);
33. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
34. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 38).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemajuan ekonomi yang akan dicapai di tahun 2023 berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang telah dituangkan dalam agenda pembangunan. Disamping itu juga menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2023, kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka pencapaian agenda pembangunan tahun 2023. Pembangunan ekonomi di tahun 2023 merupakan bagian fundamental dari proses yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga hasil dari peningkatan kegiatan perekonomian tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkeadilan. Kondisi ekonomi ke depan diperkirakan berangsur mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi 2023 diproyeksikan mulai mengalami peningkatan dan lepas dari tekanan besar setelah sebelumnya terkena akibat dampak dari pandemi Covid-19. Keberhasilan pengendalian Covid-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan.

Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena



menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (*herd immunity*) pada tahun 2022, mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah dan kebijakan untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah pada KUA Tahun 2023 ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro daerah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2023, kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka pencapaian agenda pembangunan tahun 2023. Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023, dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023, perkiraan keuangan daerah serta kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2023.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan Pemerintah Pusat dalam RKP Tahun 2023 serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam RKPD Tahun 2023.



2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Perekonomian Musi Banyuasin pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat dampak Covid-19. Secara keseluruhan, ekonomi Musi Banyuasin mampu tumbuh sebesar 3,42 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, dan sinergi yang baik antar pihak dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi daerah.

Tabel 2.1

**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi
Muba-Provinsi-Nasional Tahun 2017-2021**

	2017	2018	2019	2020	2021
MUBA	3,02	3,23	4,57	-0,04	3,42
PROVINSI	5,51	6,04	5,71	-0,11	3,58
NASIONAL	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022, Diolah

Berdasarkan data BPS Kabupaten Musi Banyuasin, pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin menunjukkan tren positif dari tahun 2017-2019, dan menurun pada tahun 2020 akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin kembali meningkat menjadi 3,42 persen.



Hampir semua lapangan usaha (sektor) mengalami pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap PDRB Kabupaten Musi Banyuasin meskipun masih di bawah tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

Berdasarkan distribusi persentase PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Tahun 2021, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu mencapai 53,67 persen (angka ini menurun dari 54,18 persen di tahun 2017). Selanjutnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,69 persen (angka ini menurun dari 12,74 persen di tahun 2017) disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 10,69 persen (angka ini meningkat dari 9,19 persen di tahun 2017). Berikutnya sektor konstruksi sebesar 7,85% (angka ini menurun dari 8,32 persen di tahun 2017) dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 4,97 persen (angka ini meningkat dari 4,57 persen di tahun 2017).

Berdasarkan data kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin diatas menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin masih tergantung pada lapangan usaha ekstraktif, yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Hal yang harus mendapat perhatian khusus walaupun 2 sektor masih memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB, pertumbuhannya



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kedua sektor ini ditambah dengan sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi perlu dijaga momentum pertumbuhannya untuk ditingkatkan dimasa mendatang sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dapat terus meningkat, disamping sektor-sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

Tabel 2.2

**Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto (PDRB)
Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Periode 2017-2021 (%)**

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,74	11,70	11,19	12,00	11,69
B	Pertambangan dan Penggalian	54,18	54,87	55,36	52,43	53,67
C	Industri Pengolahan	9,19	9,93	10,17	10,95	10,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	8,32	8,02	7,79	8,09	7,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,57	4,68	4,81	5,03	4,97
H	Transportasi dan Pergudangan	0,28	0,29	0,30	0,31	0,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,15	0,16	0,18	0,19	0,18
J	Informasi dan Komunikasi	0,23	0,25	0,26	0,31	0,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,99	1,94	1,88	1,95	1,84
L	Real Estate	1,88	1,98	2,06	2,22	2,19
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,57	3,35	3,13	3,43	3,32
P	Jasa Pendidikan	1,91	1,85	1,83	1,96	1,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,34	0,33	0,34	0,39	0,39



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,54	0,55	0,58	0,63	0,60
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba Muba Dalam Angka, 2022, diolah

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Lima sektor lapangan usaha utama yang berkontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021, diantaranya adalah:

- 1) Pertambangan dan Penggalian sebesar 53,67 persen;
- 2) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 11,69 persen;
- 3) Industri Pengolahan sebesar 10,69 persen;
- 4) Konstruksi sebesar 7,85 persen; dan
- 5) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,97 persen.



Tabel 2.3

**PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)**

LAPANGAN USAHA		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.137,78	7.119,72	7.371,60	7.911,97	8.493,84
B	Pertambangan dan Penggalian	30.352,65	33.392,11	36.682,99	34.574,36	38.989,39
C	Industri Pengolahan	5.150,33	6.043,90	6.695,83	7.221,34	7.767,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27,41	28,14	28,39	33,15	36,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,12	11,44	12,14	13,26	13,79
F	Konstruksi	4.659,23	4.881,36	5.125,04	5.336,63	5.704,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.560,76	2.846,87	3.175,05	3.318,61	3.613,09
H	Transportasi dan Pergudangan	155,77	178,24	200,56	201,61	201,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85,93	99,91	119,31	122,68	131,37
J	Informasi dan Komunikasi	128,72	149,64	174,02	202,29	221,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.115,35	1.182,11	1.238,61	1.284,94	1.335,06
L	Real Estate	1.055,13	1.204,69	1.355,54	1.462,02	1.593,72
M,N	Jasa Perusahaan	20,96	23,98	27,52	28,55	28,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.999,14	2.037,72	2.071,30	2.264,15	2.409,79
P	Jasa Pendidikan	1.067,77	1.125,20	1.206,20	1.290,31	1.384,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	191,45	199,92	225,73	259,73	283,13
R,S,T	Jasa lainnya	301,55	336,52	379,21	418,28	432,58
	Produk Domestik Bruto	56.020,03	60.861,46	66.089,04	65.943,88	72.640,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba Muba Dalam Angka, 2022, diolah

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Sebagai indikator



penting, data PDRB dapat dilihat dari pendekatan sisi penyediaan (PDRB sektoral) dan PDRB sisi penggunaan.

Perkembangan PDRB sektoral atas dasar harga berlaku dan harga konstan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah:

1. Dari sisi nilai PDRB atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tujuh belas subsektoral lapangan usaha. Tahun 2020 nilai PDRB sebesar Rp.65.943,88 milyar meningkat menjadi Rp.72.640,74 milyar pada tahun 2021. Begitu juga dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2020 nilai PDRB sebesar Rp.44.604,66 milyar meningkat menjadi Rp.46.128,39 milyar pada tahun 2021.
2. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Musi Banyuasin tahun 2021 ditunjang oleh lapangan usaha sektor sekunder yaitu sektor informasi dan komunikasi serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor informasi dan komunikasi pada tahun 2021 tumbuh sebesar 9,35% dari Rp125,74 milyar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp137,5 milyar pada tahun 2021, sedangkan untuk sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 7,75% dari Rp.1.388,14 milyar pada tahun 2020 menjadi Rp1.495,77 milyar pada tahun 2021
3. Bila ditinjau dari share PDRB atas dasar harga berlaku Musi Banyuasin ditunjang oleh lapangan usaha sektor primer yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2021 *share* sektor pertambangan dan



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

penggalian sebesar 53,67% dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 11,69%.

Sektor tersier juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin. Perbandingan sektor tersier tersebut tahun 2020 dan tahun 2021 dititikberatkan pada 3 (tiga) sektor lapangan usaha berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan yang tertinggi diantaranya yaitu;

1. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 7,78 persen dari tahun sebelumnya
2. Sektor Real Estate tumbuh sebesar 7,74 persen dan
3. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,68 persen.

Tabel 2.4

**PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)**

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*	2021**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.596,46	5.632,86	5.721,21	5.862,32	6.109,33
B Pertambangan dan Penggalian	24.944,13	25.588,54	26.823,40	26.379,81	27.093,26
C Industri Pengolahan	2.845,44	3.169,24	3.435,11	3.478,64	3.570,99
D Pengadaan Listrik dan Gas	9,94	10,37	10,89	12,31	13,10
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,81	6,27	6,51	6,96	6,99
F Konstruksi	2.813,48	2.890,10	3.026,09	3.103,38	3.216,27



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020*	2021**
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.281,11	1.333,30	1.393,26	1.388,14	1.495,77
H Transportasi dan Pergudangan	86,95	95,00	102,75	101,38	101,05
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42,87	46,95	52,29	52,13	55,61
J Informasi dan Komunikasi	88,71	98,76	110,14	125,74	137,50
K Jasa Keuangan dan Asuransi	726,62	746,92	768,24	791,56	813,94
L Real Estate	621,71	678,66	727,39	761,01	819,92
M,N Jasa Perusahaan	12,72	13,63	14,80	14,87	14,97
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.195,25	1.235,87	1.248,12	1.299,99	1.380,82
P Jasa Pendidikan	731,30	767,00	802,22	818,57	872,19
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122,11	126,58	134,61	147,57	159,05
R,S, T,U Jasa lainnya	216,64	230,16	243,37	260,27	267,63
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	41.341,25	42.670,21	44.620,40	44.604,66	46.128,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba Muba Dalam Angka, 2022, diolah

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 menjelaskan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah juga memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi serta memperhitungkan pengaruh perkembangan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesenjangan dan IPM.



Tabel 2.5

Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin

INDIKATOR	2017		2018		2019		2020		2021		2022	2023
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05-5,25	3,02	5,25-5,4	3,21	5,4-5,6	4,57	2,00-2,50	-0,04	2,40-2,70	3,42	3,5-4,00	3,75-4,25
PDRB ADHB (Rp.Trilyun)		56,02		60,86		66,09		65,94		72,64		
PDRB ADHK (Rp.Trilyun)		41,34		42,67		44,62		44,6		46,13		
Tingkat Kemiskinan (%)	17,21	16,75	15,6	16,52	14,2	16,41	15,2	16,13	14,25	15,84	15,55	15,05
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,2	2,75	5,01	3,29	4,82	4,15	4,62	4,79	4,44	3,99	3,9	3,8
IPM	66,96	66,96	70,6	67,57	69,88	67,83	68,17	67,69	69,47	68,1	68,64	69,17
Indeks Gini	0,25	0,266	0,25	0,326	0,25	0,309	0,34	0,321	0,31	0,326	0,316	0,306

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Muba Muba Dalam Angka 2022 dan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, diolah

Penetapan berbagai asumsi kerangka ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin ditujukan untuk memberikan suatu dorongan dan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan mengembangkan usaha. Dengan bertambahnya investasi dan meningkatnya skala usaha, pertumbuhan ekonomi diharapkan mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

Investasi akan mendorong permintaan barang modal dan penyerapan tenaga kerja baru untuk mengaktifkan peningkatan kapasitas pendapatan dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR Kabupaten Musi Banyuasin selama periode tahun 2017 - 2021 tergolong tinggi. Hal ini



menunjukkan bahwa untuk meningkatkan output di Kabupaten Musi Banyuasin memerlukan nilai investasi yang masih relatif tinggi. Pada tahun 2020 nilai ICOR berada pada posisi 7,10 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 9,08.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai sampai saat ini belum memberikan hasil yang maksimal pada penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Disamping itu, permasalahan penting ketenagakerjaan lainnya adalah masih besarnya lapangan pekerjaan di sektor informal yang tidak dibarengi dengan meningkatnya pekerja informal, adanya peningkatan pendidikan juga mempengaruhi pemilihan pekerjaan sesuai dengan pendidikan yang dimiliki dan dampak dari krisis ekonomi global yang melanda dunia juga mempengaruhi tingkat pengangguran. Nilai realisasi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 sebesar 3,99%, dan pada tahun 2020 sebesar 4,79%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 0,8%. Artinya tingkat kesempatan kerja meningkat sebanyak 0,8%. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin termasuk lebih rendah pada tahun 2019-2021. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan serta wilayah kabupaten yang berbatasan.

2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Dalam mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah dapat dilakukan dengan melihat isu-isu strategis yang menjadikan kekuatan dan kelemahan dan juga kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah antara lain :



2.1.2.1 Isu Strategis Pembangunan di Luar Kabupaten Musi Banyuasin

a. Pemulihan Perekonomian Pasca Covid-19

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global pada tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar ke berbagai dunia. Penanganan virus Covid-19 telah dilakukan dengan dimulainya vaksinasi Covid-19 secara bertahap, serta penerapan protokol kesehatan. Pemulihannya telah dirasakan masyarakat dengan bertumbuhnya kembali perekonomian yang sempat berkontraksi pada tahun 2020. Namun Covid-19 masih tetap harus diwaspadai dimana perkembangan virusnya menjadi lebih kuat dan penyebarannya menjadi lebih cepat ditandai dengan munculnya varian delta dan omicron.

b. Fluktuasi Harga dan Kurs Mata Uang

Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional akan terjadi ketimpangan (defisit) Neraca Pembayaran. Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan ketidakstabilan pada APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana



perimbangan (DAU, DAK dan lainnya) yang akan diterima pemerintah Kabupaten;

c. Kemiskinan dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria SDGs yang berpenghasilan kurang dari US\$ lebih kurang sebanyak 16,9 juta jiwa atau 7,5%.

d. Krisis Energi

Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha. Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat serta perlunya peran serta pemerintah dalam mencari dan menggali sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui;

e. Tuntutan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional

Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Sering tidak kesesuaian antara kemampuan dengan tanggung jawab yang diemban dan tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat dalam memangku jabatan. Kebijakan Reformasi Birokrasi



dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi dan lain-lain serta penggunaan aplikasi yang menggunakan teknologi tinggi serta dapat diakses masyarakat luas dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas;

f. Kemampuan Keuangan Negara

Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara meningkatkan penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi. Pertumbuhan ekonomi dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan



daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Anggaran merupakan alat atau komponen yang sangat penting, baik bagi suatu badan publik yang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maupun bagi suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya. Apabila prestasi suatu badan usaha dapat langsung diukur dari laba yang diperoleh, maka ukuran semacam itu nampaknya tidak dapat diterapkan pada suatu badan publik. Ukuran yang dapat diterapkan adalah sampai seberapa jauh hasil penyusunan dan pelaksanaan anggaran tersebut dapat memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan hal ini tidak selalu dapat dinilai dengan angka.

Anggaran yang ideal seharusnya memberikan gambaran mengenai pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang dan program keuangan yang memungkinkan pekerjaan tersebut dilaksanakan. Anggaran sebaiknya mudah dibaca, dipahami oleh masyarakat umum, tetapi juga cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan pemantauan dan evaluasi.

Dokumen anggaran sangat banyak jenis dan isinya, tetapi, anggaran yang baik pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik, seperti :

- 1) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mencakup seluruh kebutuhan;



- 3) Memberikan perhatian terhadap informasi yang berguna bagi pembuatan keputusan;
- 4) Menyajikan informasi dengan jelas dan mudah diperoleh.

Secara lebih spesifik, paradigma anggaran daerah yang diperlukan di era otonomi daerah saat ini adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
2. Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*);
3. Anggaran Daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
4. Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
5. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.

Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dana dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumber daya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.



2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisis proyeksi keuangan daerah lima tahun terakhir menggambarkan bahwa terjadi fluktuatif dalam penerimaan daerah khususnya dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Desa (DAD), Dana Insentif Daerah (DID). Hal ini dikarenakan sumber utama dari Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah dari dana perimbangan sekitar 70% dari APBD utamanya dari Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi yang hampir sekitar 50% dari APBD. Berdasarkan kondisi tersebut dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara terus menerus berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor



pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah tahun 2023 berkaitan dengan pendapatan daerah. Belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum.

APBD Kabupaten Musi Banyuasin disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan Perangkat Daerah (PD) dengan berpedoman Rencana Kerja (Renja).

Anggaran Daerah merupakan instrumen kebijakan bagi Pemerintah Daerah yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Pengelolaan Keuangan Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*), mempunyai kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah, serta menyediakan informasi anggaran yang akurat. Oleh karena itu penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya



melaksanakan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan daerah mengutamakan pencapaian hasil kinerja berupa *input*, *output*, *outcome* dan *impact* dari perencanaan alokasi biaya yang telah dianggarkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2023 akan difokuskan pada optimisme bahwa momentum pemulihan ekonomi akan tetap berjalan. Stabilitas harga juga akan terus dijaga, dengan pengendalian inflasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat, Peningkatan kualitas manusia Indonesia, Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, Pembangunan yang merata dan berkeadilan, Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, Bermartabat dan terpercaya, Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, Pengelolaan pemerintahan yang bersih, Efektif dan terpercaya, Sinergitas pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional tersebut maka pemerintah untuk tahun 2023 menentukan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah “***Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***”, Adapun 7 (Tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;



2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kesempatan, dan resiko yang diperkirakan terjadi hingga tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar Penyusunan RAPBN Tahun 2023 yaitu asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,3% – 5,9%. Hal ini sesuai dengan proyeksi penguatan perekonomian di negara maju maupun berkembang. Laju inflasi ditetapkan sebesar 2,0% – 4,0 %, nilai tukar rupiah terhadap dolar dikisaran Rp.14.300 - Rp. 14.800 per dollar AS, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 10 Tahun sebesar 7,34 % – 9,16 %. Asumsi harga minyak (ICP) diproyeksikan kisaran 80 - 100 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 619 – 680 ribu barel/hari, dan lifting gas bumi 1.02 juta - 1.111 juta barel setara minyak/hari, Tingkat Pengangguran Terbuka kisaran 5,3% – 6 %, Angka Kemiskinan 7,5% – 8,5%, Gini Ratio 0,375 - 0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,31% – 73,49%. Secara ringkas ekonomi makro tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :



Tabel 3.1.

Gambaran Ekonomi Makro Nasional 2022 – 2023

No	Indikator	APBN 2022	Asumsi APBN Tahun 2023
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2 – 5,8	5,3 – 5,9
2.	Inflasi (%)	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0
3.	Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.900 – 15.000	14.300 - 14.800
4.	Tingkat bunga SPN 10 th (%)	6,32 – 7,27	7,34 – 9,1
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/ barel)	55 - 65	80 - 100
6.	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	1.717 – 1.829	619 – 680
7.	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.031 – 1.103	1.02 - 1.111

Sumber : Website Kementerian Keuangan RI Tahun 2022

3.1.1 Asumsi Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang terjadi secara terus-menerus selama periode tertentu. Inflasi menunjukkan kecenderungan naiknya harga-harga umum barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Kenaikan harga tidak harus selalu dalam nilai atau persentasi yang sama. Kenaikan harga yang terjadi satu kali atau tidak terus menerus, atau hanya temporer, atau tidak berdampak luas, maka tidak dikategorikan sebagai inflasi.



Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi inflasi sesuai dengan literatur adalah : Jumlah Uang Beredar (JUB), Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Produk Domestik Bruto (PDB), dan Kurs terhadap inflasi.

Pemerintah memproyeksi laju inflasi tahun depan sebesar 2,0% – 4,0%. Pengendalian inflasi merupakan salah satu fokus yang akan dilakukan pemerintah dalam strategi makro ekonomi 2023. Laju inflasi yang terkendali menjadi salah satu kunci mendukung pencapaian ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2023 diarahkan pada upaya menjaga *keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektifitas komunikasi* yang mendukung proses pemulihan ekonomi pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.

3.1.2 Arah Kebijakan Fiskal

Anggaran pemerintah akan fokus untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, serta mendukung revitalisasi industri dengan mendorong pembangunan ekonomi hijau.

Selain itu, kebijakan fiskal tahun 2023 juga akan meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi yang didukung dengan reformasi fiskal. Reformasi ini dilakukan melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penerapan



perbaikan kualitas belanja atau spending better secara efisiensi dan efektif, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

Pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dan mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang efektif, maka rasio perpajakan akan terus meningkat. Optimalisasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) juga dilakukan dengan peningkatan inovasi layanan, dan reformasi pengelolaan asset. Selanjutnya, dirancang postur makro fiskal tahun 2023 sebagai berikut :

A. Pendapatan Negara

Pemerintah Memperkirakan Pendapatan negara sebesar 2.255,5 triliun - 2.382,6 triliun atau 11,28% - 11,37 % dari PDB. Dari sisi pendapatan negara, Kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha



serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

B. Belanja Negara

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk menghasilkan *output/outcome* yang berkualitas, Memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian serta dapat mendorong kondisi ke arah yang lebih baik.

Belanja negara bukan hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk melakukan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong *penguatan spending better* melalui penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas termasuk ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan kualitas transfer ke daerah dan dana desa

Belanja APBN didesain untuk terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp.2.017—2.152 triliun serta transfer ke



daerah dan dana desa (TKDD) berkisar Rp800—826 triliun. Prioritas belanja di antaranya untuk perlindungan sosial yang berkisar Rp.332 – Rp.349 triliun, anggaran kesehatan Rp.255 triliun yang mencakup anggaran penanganan Covid 19 Rp.116,4 triliun

C. Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kisaran 562,6 triliun - 596,7 triliun atau 2,81% - 2,95% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Belanja negara akan mencapai 2.818,1 triliun - 2.979,3 triliun, sedangkan pendapatan negara berkisar antara 2.255,5 triliun - 2.382,6 triliun. Adapun defisit anggaran pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun ini yang dipatok 840,2 triliun atau 4,5% dari PDB.

3.1.3 Lain – lain Asumsi

Saat ini, perekonomian dunia masih penuh ketidakpastian. Potensi dampak perlambatan ekonomi dunia masuk dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023. Lain-lain asumsi yang melatarbelakangi penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini dan tahun depan dari sejumlah lembaga internasional.
2. Pertumbuhan negara yang mempengaruhi ekonomi negara seperti Eropa dan Tiongkok bisa mempengaruhi nilai tukar, inflasi, dan suku bunga;



3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Program Prioritas RKP Nasional tersebut dijabarkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera menetapkan tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 Adapun tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah **“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”** yang terdiri dari 4 (empat) Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi;
3. Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang;
4. Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah

Memperhatikan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional dalam RKP, Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,5% - 6,1%;
2. Tingkat Kemiskinan 9,20%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,62%;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,09%;
5. Indeks Gini 0,35.



3.2.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 mengusung Tema **“Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan”** dengan 4 (empat) Prioritas Daerah sebagai berikut:

Untuk mendukung tema pembangunan tahun 2023 tersebut, maka ditetapkan 4 (empat) Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Angka Kemiskinan;
2. Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi;
3. Membangun Infrastruktur Dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan.

Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Laju pertumbuhan ekonomi 3,75 – 4,25%;
2. Tingkat Kemiskinan 15,05%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,8%;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,17%;



5. Indeks Gini 0,306.

Dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari pendapatan daerah dimana pendapatan daerah merupakan salah satu kunci pokok dalam penganggaran sehingga pemerintah daerah harus teliti dalam memprediksikan pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Hasil analisis realisasi dan proyeksi pendapatan daerah lima tahun terakhir menggambarkan bahwa terjadi fluktuatif dalam penerimaan daerah khususnya dari dana perimbangan (dana transfer daerah). Hal ini dikarenakan sumber utama dari pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah dari dana perimbangan yang rata-rata sekitar 90%. Berdasarkan kondisi tersebut dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang



dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah.

Kebijakan Perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Analisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pengalokasian belanja daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima baik itu yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun yang diperoleh dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adapun Belanja wajib daerah telah memenuhi *mandatory spending* yaitu anggaran fungsi Pendidikan sebesar 20% dari APBD, anggaran Kesehatan sebesar 10% dari APBD diluar gaji, penggunaan Dana Transfer Umum paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang berkaitan dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi sesuai amanat undang-undang dengan rincian sebagai berikut :
 - anggaran pendidikan : Rp. 610.090.578.149 (22,69%)
 - anggaran kesehatan : Rp. 547.605.095.936 (32,70%)
 - infrastruktur publik : Rp. 646.940.018.344 (29,53%)
- b. Belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;



- d. Belanja program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat;
- e. Melakukan efisiensi terhadap besaran Belanja Perangkat Daerah (PD) dan mengalihkannya pada Belanja Program yang terkait upaya pemulihan ekonomi selama pandemi covid-19, penurunan angka kemiskinan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- f. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi selama pandemi covid-19, penurunan angka kemiskinan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- g. Mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat tangkap dan lain-lain;
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di perdesaan;
- i. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya.

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah



sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA);
2. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup pembayaran pokok pinjaman dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang



berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Selanjutnya Pembiayaan Netto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Neto harus dapat menutup defisit APBD. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya juga pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi sumber penerimaan daerah dan dari sisi pengeluaran daerah.

Kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah tahun 2023 berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan



digunakan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. APBD Kabupaten Musi Banyuasin disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan Perangkat Daerah (PD) dengan berpedoman Rencana Kerja (Renja) PD.

Anggaran Daerah merupakan instrumen kebijakan bagi Pemerintah Daerah yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah. Pengembangan kapabilitas dimaksudkan sebagai upaya untuk memperbaiki kemampuan Pemerintah Daerah menjalankan fungsi dan perannya secara efisien. Sedangkan peningkatan efektifitas diartikan sebagai upaya untuk menyelaraskan kapabilitasnya dengan tuntutan dan kebutuhan publik. Oleh karena itu Pengelolaan Keuangan Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*), mempunyai kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah, serta menyediakan informasi anggaran yang akurat. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya melaksanakan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan daerah mengutamakan pencapaian hasil program, termasuk kinerja



berupa *input*, *output*, *outcome* dan *impact* dari perencanaan alokasi biaya yang telah dianggarkan.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (*riil*) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

4.1. Kebijakan Perencanaan, Pendapatan, Daerah yang di Proyeksikan untuk Tahun 2023.

Secara umum terlihat bahwa selama kurun waktu 2019-2021 realisasi pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan. Pada tahun 2019 ditetapkan penerimaan daerah sebesar Rp. 3.941.909.794.940. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp. 3.540.659.694.225. Dan pada tahun 2021 penerimaan daerah mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp. 3.510.691.709.632.



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

Tabel 4.1

**Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2019 – 2021**

NO	PENDAPATAN	REALISASI		
		2019	2020	2021
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	286.594.847.515	353.989.261.395	377.346.398.574
1.1.1	Pajak Daerah	69.943.956.305	79.220.521.196	79.315.580.439
1.1.2	Retribusi Daerah	6.812.210.395	12.201.663.299	8.022.396.031
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.600.521.898	15.206.508.321	17.341.957.795
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	195.238.158.916	247.360.568.578	272.666.464.308
1.2	Pendapatan Transfer	3.366.601.427.302	2.909.333.422.093	2.804.111.596.486
1.2.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.405.793.795.815	1.908.963.956.440	1.851.636.079.750
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	397.430.383.000	376.024.938.000	372.756.063.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	300.109.018.487	331.728.204.653	292.571.213.639
1.2.4	Dana Alokasi Desa (DAD)	227.973.390.000	232.888.342.000	233.443.654.097
1.2.5	Dana Insentif Daerah (DID)	35.294.840.000	59.727.981.000	53.704.586.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	288.713.520.123	277.337.010.737	329.233.714.572
1.3.1	Pendapatan Hibah	89.360.190.356	132.725.329.580	107.950.732.347
1.3.2	Pendapatan Bagi Hasil	172.871.938.767	99.704.327.227	111.916.782.665
1.3.3	Bantuan Keuangan	26.481.391.000	44.907.353.930,00	109.366.199.560
TOTAL		3.941.909.794.940	3.540.659.694.225	3.510.691.709.632

Sumber: BP2RD dan BPKAD Kab.Musi Banyuasin, 2019- 2021



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi Pendapatan Tahun 2022 sampai dengan 31 Mei 2022

No	Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang	%
	Kabupaten Musi Banyuasin				
4	PENDAPATAN DAERAH	3.723.785.554.012,00	950.143.650.035,00	-2.773.641.903.977,00	25,52
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	387.921.077.000,00	120.155.559.210,39	-267.765.517.789,61	30,97
4.1.1	Pajak Daerah	90.755.404.000,00	33.874.756.568,00	-56.880.647.432,00	37,33
4.1.2	Retribusi Daerah	7.915.942.000,00	1.215.928.670,00	-6.700.013.330,00	15,36
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.500.000.000,00	19.065.474.112,22	1.565.474.112,22	108,95
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	271.749.731.000,00	65.999.399.860,17	-205.750.331.139,83	24,29
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.335.527.194.012,00	829.988.090.824,61	-2.505.539.103.187,39	24,88
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.236.021.828.012,00	804.020.984.543,00	-2.432.000.843.469,00	24,85
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.505.366.000,00	25.967.106.281,61	-73.538.259.718,39	26,1
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	337.283.000,00	0	-337.283.000,00	0
4.3.1	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	337.283.000,00	0	-337.283.000,00	0
	JUMLAH PENDAPATAN	3.723.785.554.012,00	950.143.650.035,00	-2.773.641.903.977,00	25,52

Sumber: BP2RD dan BPKAD Kab.Musi Banyuasin, 2022



Tabel 4.2

**Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023**

NO	URAIAN	PROGNOSIS 2023
1	PENDAPATAN	2.799.518.902.000
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	382.551.175.000
1.1.1	Pajak Daerah	92.420.404.000
1.1.2	Retribusi Daerah	7.525.360.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.000.000.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	263.605.411.000
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.416.585.715.000
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.287.962.696.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	128.623.019.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	382.012.000
1.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	382.012.000
TOTAL		2.799.518.902.000

Sumber: BP2RD dan BPKAD Kab.Musi Banyuasin 2022

Untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara bertahap menata infrastruktur dan suprastruktur daerah, satu dengan yang lainnya koheren dan konkruen, berinteraksi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih. Pendapatan daerah yang juga diperoleh dari dana perimbangan terus ditingkatkan tertib pengelolaannya mulai pada tahapan pendataan sumber-sumber di daerah sampai dengan perhitungan tentatif besarnya alokasi pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin.



4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 berasal dari pendapatan pajak daerah yang diproyeksikan berdasarkan data historis pendapatan pajak daerah dari tahun 2019-2021. Penerimaan pajak daerah pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.92.420.404.000,00. Hal ini dikarenakan sudah mulai efektifnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dulunya merupakan pajak kewenangan pemerintah pusat dialihkan menjadi pajak Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009. Disamping itu kebijakan perpajakan daerah lainnya juga memberikan kontribusi bagi meningkatkan penerimaan pajak daerah ini seperti Pajak Air Tanah yang dahulunya merupakan Pajak Provinsi sekarang diserahkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dahulunya Pajak Pusat sekarang diserahkan menjadi Pajak Daerah.

Untuk pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah pada tahun 2019-2021 juga mengalami fluktuatif, dan diproyeksikan pada tahun 2023 Rp.7.525.360.000,00. Hal ini disebabkan makin efektif dan gencarnya upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari sumber ini. Begitupun dengan pendapatan daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp.19.000.000.000,00 pada tahun 2023. Untuk lain-lain



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp.263.605.411.000,00 pada tahun 2023.

Sementara itu pada jenis pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp.2.287.962.696.000,00 pada tahun 2023. Serta pendapatan transfer antar daerah diproyeksikan sebesar Rp.128.623.019.000,00. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk APBD telah memenuhi persyaratan minimal 10% Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yaitu sebesar Rp.222.448.242.700,00.

Sumber penerimaan daerah yang terbesar pada tahun 2023 diproyeksikan masih diperoleh dari bagian pendapatan dana transfer, yaitu sebesar 78,50 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Fenomena ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih bergantung sumber penerimaan yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Pertumbuhan realisasi pendapatan tersebut didukung oleh pengelolaan dan kebijakan yang mengacu pada potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin. Selain dari sumber-sumber pendapatan yang sudah dikelola selama ini, masih terdapat sumber-sumber pendapatan yang potensial penerimaannya dengan tetap memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat. Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2023 adalah sebagai berikut:



a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan meningkat setiap tahunnya, yang bersumber dari: Pajak Daerah (hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian C); Retribusi Daerah (jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu); Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PDAM, PT. Petro Muba Holding, Bank Sumsel, PDPDE); Lain-lain PAD yang sah (Penjualan asset daerah, jasa giro, bunga deposito, ganti rugi, denda keterlambatan, denda retribusi, pendapatan lain-lain dan BLUD). Langkah-langkah prioritas yang ditempuh dalam rangka optimalisasi target PAD antara lain sebagai berikut:

- Perbaikan dalam administrasi perpajakan menyangkut pendataan objek pajak, penghitungan, penetapan serta penerapan sanksi baik kepada wajib pajak maupun aparatur pajak yang melanggar ketentuan perpajakan daerah;
- Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- Peningkatan Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- Review Perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, khususnya yang berhubungan dengan retribusi daerah dan pajak daerah;
- Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

- Peningkatan koordinasi antar OPD dalam upaya meningkatkan PAD;
 - Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan lembaga keuangan lainnya. terutama menyangkut perolehan dana perimbangan.
- b. Pendapatan Transfer (DAU, DAK, Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak SDA) diharapkan dapat meningkat/naik setiap tahunnya, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB, serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi;
 - Mencari dan menggali sumber pajak baru yang bisa meningkatkan pendapatan daerah;
 - Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun Anggaran 2019-2022 diupayakan naik setiap tahunnya, dengan mengupayakan adanya peningkatan perolehan Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan bantuan keuangan provinsi melalui koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat.



BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

5.1. Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja

Kebijakan Perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Analisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten Musi Banyuasin bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

Pengalokasian belanja daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima baik itu yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun yang diperoleh dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Berikut Realisasi Belanja Tahun 2019-2021 dan Target Belanja Tahun 2023 diluar belanja DAK seperti pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Realisasi Belanja Tahun 2019-2020

NO	JENIS BELANJA	REALISASI	
		2019	2020
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.360.418.604.306	1.350.886.696.253,10
2.1.1	Belanja Pegawai	788.752.944.526	807.612.409.527
2.1.2	Belanja Bunga	16.711.549.766	19.894.751.077
2.1.3	Belanja Subsidi	29.222.046.831	46.193.540.000
2.1.4	Belanja Hibah	37.401.701.278	20.975.758.835
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	398.000.000	311.000.000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	487.019.096.700	454.543.447.614,10
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	913.265.205	1.355.789.200
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.286.793.835.070,96	2.026.691.962.737,64
2.2.1	Belanja Pegawai	70.239.842.240	41.894.591.484
2.2.1	Belanja Barang dan Jasa	1.114.134.758.470,05	1.194.092.445.914,73
2.2.1	Belanja Modal	1.102.419.234.360,91	790.704.925.338,91
TOTAL.....		3.647.212.439.376,96	3.377.578.658.990,74

Sumber: Perda Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2019-2020 (Permendagri No.13 / 2006)



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.2
Realisasi Belanja Tahun 2021**

No	Daerah	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
5	BELANJA DAERAH	4.199.063.344.221,00	3.836.457.605.910,48	-362.605.738.310,52	91,36
5.1	BELANJA OPERASI	2.556.011.657.399,00	2.271.258.011.014,17	-284.753.646.384,83	88,85
5.1.1	Belanja Pegawai	1.045.912.595.891,00	953.392.507.260,00	-92.520.088.631,00	91,15
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.452.515.316.479,00	1.269.485.693.192,17	-183.029.623.286,83	87,39
5.1.3	Belanja Bunga	21.659.377.865,00	15.843.408.598,00	-5.815.969.267,00	73,14
5.1.5	Belanja Hibah	35.524.367.164,00	32.224.901.964,00	-3.299.465.200,00	90,71
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	311.500.000,00	-88.500.000,00	77,87
5.2	BELANJA MODAL	1.172.223.769.410,00	1.097.177.454.587,31	-75.046.314.822,69	93,59
5.2.1	Belanja Tanah	13.822.257.376,00	11.586.787.866,00	-2.235.469.510,00	83,82
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	207.559.625.287,00	184.093.954.709,00	-23.465.670.578,00	88,69
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	347.819.645.698,00	315.940.503.064,17	-31.879.142.633,83	90,83
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	588.678.748.284,00	572.304.162.158,14	-16.374.586.125,86	97,21
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.343.492.765,00	13.252.046.790,00	-1.091.445.975,00	92,39
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.753.000.000,00	1.018.853.800,00	-734.146.200,00	58,12
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.753.000.000,00	1.018.853.800,00	-734.146.200,00	58,12
5.4	BELANJA TRANSFER	469.074.917.412,00	467.003.286.509,00	-2.071.630.903,00	99,55
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	469.074.917.412,00	467.003.286.509,00	-2.071.630.903,00	99,55
	JUMLAH BELANJA	4.199.063.344.221,00	3.836.457.605.910,48	-362.605.738.310,52	91,36
	SURPLUS/DEFISIT	-585.373.007.105,00	-325.765.896.277,73	259.607.110.827,27	

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD Kab.Musi Banyuasin 2021 Priode 01 Januari s.d 31 Desember 2021
(Permendagri No.77 Th.2020)



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.3
Realisasi Belanja Tahun 2022**

No	Daerah	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
5	BELANJA DAERAH	3.519.936.934.831,00	698.450.514.544,50	-2.821.486.420.286,50	19,84
5.1	BELANJA OPERASI	2.350.473.944.591,00	500.474.959.927,50	-1.849.998.984.663,50	21,29
5.1.1	Belanja Pegawai	1.103.923.240.024,00	286.900.113.969,50	-817.023.126.054,50	25,99
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.224.196.392.100,00	205.890.350.129,00	-1.018.306.041.971,00	16,82
5.1.3	Belanja Bunga	10.040.682.467,00	4.434.495.829,00	-5.606.186.638,00	44,17
5.1.5	Belanja Hibah	11.913.630.000,00	3.250.000.000,00	-8.663.630.000,00	27,28
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	0	-400.000.000,00	0
5.2	BELANJA MODAL	683.578.566.540,00	26.454.075.825,00	-657.124.490.715,00	3,87
5.2.1	Belanja Tanah	9.481.239.475,00	0	-9.481.239.475,00	0
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.615.339.893,00	3.525.995.575,00	-147.089.344.318,00	2,34
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	205.068.006.849,00	22.928.080.250,00	-182.139.926.599,00	11,18
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	303.204.546.323,00	0	-303.204.546.323,00	0
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.209.434.000,00	0	-15.209.434.000,00	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	0	-2.500.000.000,00	0
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	0	-2.500.000.000,00	0
5.4	BELANJA TRANSFER	483.384.423.700,00	171.521.478.792,00	-311.862.944.908,00	35,48
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	483.384.423.700,00	171.521.478.792,00	-311.862.944.908,00	35,48
	JUMLAH BELANJA	3.519.936.934.831,00	698.450.514.544,50	-2.821.486.420.286,50	19,84
	SURPLUS/DEFISIT	203.848.619.181	251.693.135.490,50	47.844.516.309,50	

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD Kab.Musi Banyuasin 2022 Priode 01 Januari s.d 31 Mei 2022

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan dikaitkan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. Belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;



- c. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- d. Belanja program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat;
- e. Belanja Program yang terkait upaya pemulihan ekonomi selama pandemi covid-19, penurunan angka kemiskinan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- f. Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi selama pandemi covid-19, penurunan angka kemiskinan, Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- g. Mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat tangkap dan lain-lain;
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan;
- i. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dalam bentuk



kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang,



unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar
urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
- 2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;



- d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
- b. urusan pemerintahan pilihan
- urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
- 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pariwisata;
 - 3) pertanian;
 - 4) kehutanan;
 - 5) energi dan sumber daya mineral;



- 6) Perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.
- c. unsur pendukung, meliputi:
 - 1) sekretariat Daerah; dan
 - 2) sekretariat DPRD.
- d. unsur penunjang, meliputi:
 - 1) perencanaan;
 - 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan;
 - 6) penghubung; dan
 - 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- e. unsur pengawas yaitu inspektorat;
unsur kewilayahan, meliputi:
 - 1) kabupaten/kota administrasi; dan
 - 2) kecamatan.
- f. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik;
dan
- g. unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki



manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.



Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Struktur Belanja Daerah

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Struktur belanja daerah sebagaimana tercantum di atas diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.



Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN/PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik,



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Penganggaran tambahan penghasilan PNSD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, Esselonering dan pangkat/golongan di seluruh OPD, yang besaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin.
 - Berdasarkan Beban Kerja, Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD), Pendapatan Daerah (BPPRD), Pengawasan (Inspektorat), Pelayanan Terpadu (DPM dan PTSP), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sekretaris Daerah, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;
 - Berdasarkan Tempat Bertugas, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin;
 - Berdasarkan Kelangkaan Profesi, RSUD Sekayu dan Dinas Kesehatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.



2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau



pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- c) Penganggaran jasa Narasumber, Moderator, pembawa acara/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima



- gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk



mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

Kategori skema ganda, yaitu:

- (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- (1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.



- (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
- (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
 - (a) Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
 - (e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan



oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

- (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- (1) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - (2) Pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - (3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*,



lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- (g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan



pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya;

- (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
- (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
- (5) Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19* (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *COVID-19*).

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.



- (l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- (m) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis



nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual



produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Pemerintah Daerah tidak menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

- 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
 - a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan



belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

- (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- (5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah TA. 2023	Jumlah	SKPD
PMI Kab. Musi Banyuasin	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
Bantuan Hibah Partai Politik	1.695.170.000,00	Badan Kesbangpol
KPUD Kab. Musi Banyuasin	5.000.000.000,00	Badan Kesbangpol
KONI Kab. Musi Banyuasin	7.500.000.000,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kwarcab Pramuka Kab. Musi Banyuasin	2.000.000.000,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Polres Musi Banyuasin (ETLE)	3.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
Jumlah	20.695.170.000,00	



b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.



Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung



dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a) belanja modal tanah;

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) belanja modal Gedung dan Bangunan;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan,



jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Belanja modal aset tetap lainnya;

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka,



bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas



dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau



- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keadaan darurat meliputi :

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau



- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Keperluan mendesak meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;



- a) belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
- (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- b) belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya



dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Belanja Tidak Terduga TA. 2023 sebesar Rp. 1.500.000.000,00

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.



1) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
- b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
- c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum



peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah



desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana Transper Pemerintah Pusat yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 222.448.242.700,00

Secara rinci proyeksi anggaran Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 dijabarkan pada tabel berikut :



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.4
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023**

KODE	URAIAN	RANCANGAN KUA PPAS	KET
1	2	3	4
5	BELANJA	2.688.680.652.297,00	
5.1	BELANJA OPERASI	2.020.722.684.072,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.014.307.967.107,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	980.819.546.965,00	
5.1.03	Belanja Bunga	4.700.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	20.695.170.000,00	
	- KONI	7.500.000.000,00	Dispopar
	- Pramuka	2.000.000.000,00	Dispopar
	- PMI	1.500.000.000,00	Dinkes
	- Parpol	6.695.170.000,00	Kesbangpol
	- Polres Muba (ETLE)	3.000.000.000,00	Dishub
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	Dinsos
5.2	BELANJA MODAL	444.009.725.525,00	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	13.560.615.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.726.312.638,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.399.910.884,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.490.782.603,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.832.104.400,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	222.448.242.700,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	222.448.242.700,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	110.838.249.703,00	
	JUMLAH BELANJA	2.688.680.652.297,00	



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. penerimaan pembiayaan yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA);
2. pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembayaran pokok cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah dan pembentukan dana cadangan.

Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam



program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023



yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat



ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam



rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Pemerintah Daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) masyarakat (obligasi daerah)

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- (1) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang; salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- (2) kerangka acuan kegiatan;
- (3) RPJMD
- (4) RKPD;
- (5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- (6) APBD tahun anggaran berjalan;
- (7) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- (8) rencana keuangan pinjaman daerah yang;



- (9) menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- (10) pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas;
- (11) pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- (12) perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman / DSCR; dan
- (13) perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya
- (14) jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka



penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan



setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.

5) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6.1

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2021

No.	Jenis Belanja	Realisasi (Rp.)		
		2019	2020	2021
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	493.229.904.303,48	691.747.536.094,40	819.314.146.595,48
6.1.1	Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	247.489.457.842,48	591.786.528.942,40	675.605.322.695,48
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	245.740.446.461,00	99.961.007.152,00	143.708.823.900,00

Sumber: BPKAD Kab. Musi Banyuasin



Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Per 31 Mei 2022

No	Uraian	Berjalan (Rp)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	22.668.285.750,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	22.668.285.750,00

Sumber: BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2022

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi sumber penerimaan daerah dan dari sisi pengeluaran daerah. Dari sisi sumber penerimaan daerah yaitu Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) untuk tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.30.000.000.000,00

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.



Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.



2) penyertaan modal daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan



dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD



tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- d) dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan



sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar



dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) pembentukan dana cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2024, dapat membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi.

Untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.



4) pemberian pinjaman daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6.2

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2021

No.	Pembiayaan	Realisasi (Rp.)		
		2019	2020	2021
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	196.140.730.925,00	179.223.248.634,00	221.812.445.858,00
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	12.500.000.000,00	82.963.150.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah	146.140.730.925,00	166.723.248.634,00	138.849.295.858,00

Sumber: BPKAD Kab. Musi Banyuasin,



**Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Per 31 Mei 2022**

No	Pembiayaan	Berjalan (Rp)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	123.466.346.046,00
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	27.600.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	95.866.346.046,00

Sumber: BPKAD Kab. Musi Banyuasin, 2022,

Pada tahun 2023 Pengeluaran Daerah terdiri dari :

- a) pada tahun 2023 pembentukan dana cadangan sebesar Rp. 24.000.000.000,-
- b) pada tahun 2023 penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp. 26.000.000.000,- terdiri dari :
 - (1) Perumda Air Minum Tirta Randik sebesar Rp. 15.000.000.000,-
 - (2) PT. Petro Muba Holding sebesar Rp. 5.000.000.000,-
 - (3) PT. Muba Energy Maju Berjaya sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - (4) PT. Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- c) pada tahun 2023, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp. 90.838.249.703,-



**Tabel 6.3
Rancangan Pembiayaan Daerah Tahun 2023**

KODE	URAIAN	RANCANGAN KUA PPAS	KET
1	2	3	4
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	140.838.249.703,00	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	24.000.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	26.000.000.000,00	
	- Perumda Air Minum Tirta Randik	15.000.000.000,00	
	- PT. Petro Muba Holding	5.000.000.000,00	
	- PT. Muba Energy Maju Berjaya	1.000.000.000,00	
	- PT. Bank Sumsel Babel	5.000.000.000,00	
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	90.838.249.703,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(110.838.249.703,00)	

Sumber : RKPD Tahun 2023



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Ekonomi Makro Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan uraian penetapan kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama. Indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Terkait upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan daerah diharapkan, (3) Memfokuskan pada hal – hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 RKPD masa transisi pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Untuk melihat keberhasilan atau ketidakberhasilan Kinerja Pemerintah tahun sebelumnya, maka dapat dilihat capaian dan realisasi dan indikator kinerja utama pelaksanaan



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

RPJMD Tahun 2021 pada Tabel 7.1 Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 7.1
Capaian dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1.	Mewujudkan Musi Banyuasin yang Bersih dan Melayani	1	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3	4	133,33
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	85,35	99,24
		3	Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	3	2,82	94,00
2.	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas	4.	Persentase Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis Lainnya yang Terkoneksi Dalam Kondisi Mantap	79,28	72,29	91,18
		5.	Persentase KK yang Terlayani Air Bersih	92	87,51	95,12
		6.	Persentase Rumah Tangga dengan sanitasi (air Limbah) yang Layak	95	81,26	85,54
3.	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	7.	Pertumbuhan Ekonomi	2,40-2,70	3,42	78,95
		8.	Indeks Desa Membangun	0,704	0,704	100
		9.	Indeks Gini	0,31	0,326	95,09
4	Menurunkan Angka Kemiskinan	10.	Angka Kemiskinan	14,25	15,84	88,84
		11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44	3,99	111,28
		12.	Nilai Tukar Petani	100,10	113,15	113,08
5.	Meningkatnya indeks pembangunan manusia	13.	Indeks Pembangunan Manusia	70,99	68,1	98,03



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
6.	Meningkatnya Prestasi Generasi Muda	14. Persentase Penghargaan yang dicapai oleh generasi muda minimal ditingkat provinsi terhadap generasi muda yang dibina	93,97	91,48	97,35
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,78	73,11	97,77
8.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	16. Indeks Pembangunan gender (IPG)	83,00	82,90	99,88
		17. Persentase Kecamatan Layak anak	46,67	53,34	114,29
9.	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Disabilitas	18. Persentase Disabilitas yang mendapat layanan	78,00	84,12	107,85

Sumber : RKPD Kab. Muba Tahun 2023

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja



pemerintah daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan memperhatikan peluang serta tantangan selama kurun waktu empat tahun mendatang sampai dengan tahun 2026.

Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023. Pada tabel ini disajikan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tercantum dan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

**Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kab. Muba Tahun 2023**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET (TAHUN)			
		2023	2024	2025	2026
1	Angka Kemiskinan	15,05	14,35	13,85	13,35
2	Indeks Gini	0,306	0,296	0,286	0,276
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,8	3,65	3,5	3,35
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,75-4,25	4,00-4,50	4,25-4,75	4,35-5,00
5	Indeks Pelayanan Infrastruktur	85,44	91,15	92,17	93,37
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,17	69,71	70,25	70,78
7	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC	B
8	Pengeluaran Per Kapita	10.602	10.883	11.064	11.295
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,71	70,03	70,38	70,76



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET (TAHUN)			
		2023	2024	2025	2026
10	Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK)	3,38	3,69	4,01	4,34
11	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	1,76	1,94	2,12	2,31
12	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (ADHK)	0,70	1,05	1,40	1,75
13	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	0,79	1,12	1,47	1,82
14	Nilai Tukar Petani	93,00	95,00	97,00	100,00
15	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	68,62%	73,14%	76,52%	80,10%
16	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Bersih	95,20%	100%	100%	100%
17	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi (Air Limbah) yang Layak	92,50%	100%	100%	100%
18	Persentase Kawasan Kumuh Tertangani	78,97%	58,17%	37,50%	0%
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,51%	66,01%	66,29%	66,72%
20	Harapan lama Sekolah (HLS)	12,60	12,76	12,91	13,07
21	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,74	7,8	7,86	7,91
22	Usia Harapan Hidup (UHH)	69,08	69,2	69,33	69,45
23	Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	BB	BB	BB	BB
24	Opini BPK RI terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	92	92	92
26	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,1025	3,235	3,3675	3,5

Sumber: RPD Kab. Muba 2023 – 2026

Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik yang secara kuantitatif dan atau kualitatif menjadi dampak yang dapat



menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Target capaian Indikator Kinerja Daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021 pada tabel 7.1 di atas dan kondisi eksisting tahun berjalan 2021 terhadap pemulihan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengambil langkah dengan menjalankan beberapa strategi dan arah kebijakan seperti pada tabel berikut:

Tabel 7.3

Strategi Dan Arah Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

NO.	STRATEGI	ARAH
1.	Pemulihan Ekonomi melalui Ketahanan UMKM	a. Mengembangkan kewirausahaan, ketahanan UMKM diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga miskin b. Memberikan stimulus keuangan kepada UMKM.
2.	Pengembangan pertanian yang unggul dan berdaya saing	a. Mengoptimalkan pengembangan lahan tidur atau lahan terlantar, lahan gambut dan daerah pasang surut untuk produksi pertanian b. Meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana petani dan nelayan
3.	Pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian berbasis IPTEK dan Inovasi	a. Memberikan kemudahan perijinan investasi industri pengolahan (hilirisasi) b. Mengembangkan teknologi produksi dan pengolahan c. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan strategis antara UMKMK dan pengusaha besar
4.	Pengembangan Pariwisata	a. Meningkatkan prasarana dan sarana destinasi pariwisata b. Mengembangkan pusat pendidikan dan kepariwisataan c. Mengembangkan wisata olahraga, religious, kuliner dan budaya d. Memperluas jaringan promosi dan pemasaran pariwisata



NO.	STRATEGI	ARAH
5.	Optimalisasi pengelolaan pertambangan	a. Meningkatkan standar mutu pengolahan hasil tambang b. Mengembangkan dan mengadopsi teknologi pengolahan pertambangan ramah lingkungan

Sumber : RKPD Tahun 2023

7.2 Strategi Pencapaian Asumsi Penyusunan APBD

Arah Kebijakan Pembangunan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 diarahkan untuk **“Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan”** dengan prioritas daerah sebagai berikut :

1. meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan;
2. meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
3. membangun infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan.

Adapun strategi yang dilakukan melalui dengan Penetapan Program Prioritas Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 sebagai upaya pencapaian Sasaran Program Prioritas seperti tergambar pada tabel 7.4 di bawah ini:



Tabel 7.4.

Sasaran Program Prioritas Kab. Muba Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
1	Meningkatkan Pendapatan dan Mengurangi Beban Masyarakat untuk Menurunkan Angka Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Dinas Sosial
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan	Dinas Tanaman Pangan,



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Hortikultura dan Peternakan
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Perkebunan
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Perikanan
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan Dan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil	Dinas Perikanan



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
		Pemasaran Hasil Perikanan	Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Perikanan
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang	Dinas Penanaman



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	Membangun Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengembangan Perumahan	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
4	Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Dinas Kesehatan



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
			Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh	Dinas Ketahanan Pangan



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Semua OPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua OPD
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala	Semua OPD



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua OPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua OPD
			Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Semua OPD
			Layanan Administrasi DPRD	Semua OPD
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Semua OPD
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Semua OPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua OPD
			Penataan Organisasi	Semua OPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua OPD
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Semua OPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua OPD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua OPD
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Pengawasan Organisasi Masyarakat	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Mutasi dan Promosi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Pengembangan Kompetensi ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	Dinas Komunikasi dan Informatika



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dinas Perhubungan
			Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Prioritas Daerah Tahun 2023	Program Prioritas Daerah Tahun 2023	Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023	OPD
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Sekayu

Sumber : RKPD Tahun 2023

7.3 Langkah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sumber penerimaan daerah yang terbesar pada tahun 2023 diproyeksikan masih diperoleh dari bagian dana pendapatan dana transfer, yaitu sebesar 78,50 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Fenomena ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih mengandalkan sumber penerimaan yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Pertumbuhan realisasi pendapatan tersebut didukung oleh pengelolaan dan kebijakan yang mengacu pada potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin. Selain dari sumber-sumber pendapatan yang sudah dikelola selama ini, masih terdapat sumber-sumber pendapatan yang potensial penerimaannya dengan tetap memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat. Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2023 adalah sebagai berikut :



a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan meningkat setiap tahunnya, yang bersumber dari: Pajak Daerah (hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian C; Retribusi Daerah (jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu); Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PDAM, PT. Petro Muba Holding, Bank Sumsel, PDPDE); Lain-lain PAD yang sah (Penjualan asset daerah, jasa giro, bunga deposito, ganti rugi, denda keterlambatan, denda retribusi, pendapatan lain-lain dan BLUD). Langkah-langkah prioritas yang ditempuh dalam rangka optimalisasi target PAD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin antara lain sebagai berikut:

- perbaikan dalam administrasi perpajakan menyangkut pendataan objek pajak, penghitungan, penetapan serta penerapan sanksi baik kepada wajib pajak maupun aparatur pajak yang melanggar ketentuan perpajakan daerah;
- sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- review perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, khususnya yang berhubungan dengan retribusi daerah dan pajak daerah;
- pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;



- peningkatan koordinasi antar OPD dalam upaya meningkatkan PAD;
 - peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan lembaga keuangan lainnya, terutama menyangkut perolehan dana perimbangan.
- b. Pendapatan Transfer (DAU, DAK, Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak SDA) diharapkan dapat meningkat/naik setiap tahunnya, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21 dan BPHTB, serta bagi hasil pajak dari pusat dan provinsi;
 - mencari dan menggali sumber pajak baru yang bisa meningkatkan pendapatan daerah;
 - peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2023 diupayakan naik, dengan mengupayakan adanya peningkatan perolehan Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan bantuan keuangan Provinsi melalui koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat.

7.4 Langkah Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :



- a. belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adapun Belanja wajib daerah telah memenuhi *mandatory spending* yaitu anggaran fungsi Pendidikan sebesar 20% dari APBD, anggaran Kesehatan sebesar 10% dari APBD diluar gaji, penggunaan Dana Transfer Umum paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang berkaitan dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi sesuai amanat undang-undang dengan rincian sebagai berikut :
- anggaran pendidikan : Rp. 610.090.578.149 (22,69%)
 - anggaran kesehatan : Rp. 547.605.095.936 (32,70%)
 - infrastruktur publik : Rp. 646.940.018.344 (29,53%)
- b. belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;



- d. belanja program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat;
- e. melakukan efisiensi terhadap besaran Belanja Perangkat Daerah (PD) dan mengalihkannya pada Belanja Program yang terkait upaya pemulihan ekonomi selama pandemi covid-19, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- f. peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi selama pandemi covid-19, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- g. mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat tangkap dan lain-lain;
- h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di perdesaan;
- i. belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan



pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak yang dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keadaan darurat meliputi:



- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Keperluan mendesak meliputi :

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, yang terdiri dari :



- a) belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
- (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- b) belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai :



- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.



7.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi sumber penerimaan daerah dan dari sisi pengeluaran daerah.

- a. Dari sisi sumber penerimaan daerah yaitu penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) untuk tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,-
- b. Dari sisi Sumber Pengeluaran Daerah antara lain :
 - pembentukan dana cadangan pada tahun 2023 sebesar Rp. 24.000.000.000,-
 - penyertaan modal pemerintah daerah pada tahun 2023 sebesar Rp. 26.000.000.000,- terdiri dari :
 - 1) Perumda Air Minum Tirta Randik sebesar Rp. 15.000.000.000,-
 - 2) PT. Petro Muba Holding sebesar Rp. 5.000.000.000,-
 - 3) PT. Muba Energy Maju Berjaya sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - 4) PT. Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 5.000.000.000,-



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

- pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada tahun 2023 sebesar Rp. 90.838.249.703,-

**Tabel 7.5
Target Pembiayaan Daerah Tahun 2023**

NO	URAIAN	RANCANGAN KUA PPAS
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	30.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran sebelumnya	30.000.000.000,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	140.838.249.703,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	24.000.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	26.000.000.000,00
	- Perumda Air Minum Tirta Randik	15.000.000.000,00
	- PT. Petro Muba Holding	5.000.000.000,00
	- PT. Muba Energy Maju Berjaya	1.000.000.000,00
	- PT. Bank Sumsel Babel	5.000.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	90.838.249.703,00

Sumber : RKPD Tahun 2023



**Tabel 7.6
RINGKASAN STRUKTUR
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	RANCANGAN KUA PPAS	KET
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	2.799.518.902.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	382.551.175.000,00	
4.1.1	Pajak Daerah	92.420.404.000,00	
4.1.2	Retribusi Daerah	7.525.360.000,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.000.000.000,00	
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	263.605.411.000,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.416.585.715.000,00	
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.287.962.696.000,00	
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	128.623.019.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	382.012.000,00	
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan	382.012.000,00	
5	BELANJA	2.688.680.652.297,00	
5.1	BELANJA OPERASI	2.020.722.684.072,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	1.014.307.967.107,00	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	980.819.546.965,00	
5.1.3	Belanja Bunga	4.700.000.000,00	
5.1.4	Belanja Subsidi	-	
5.1.5	Belanja Hibah	20.695.170.000,00	
	- <i>KONI</i>	7.500.000.00,00	Dispapar
	- <i>Pramuka</i>	2.000.000.000,00	Dispapar
	- <i>PMI</i>	1.500.000.000,00	Dinkes
	- <i>Parpol</i>	1.695.170.000,00	Kesbangpol



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	URAIAN	RANCANGAN KUA PPAS	KET
1	2	3	4
	- KPUD Kab. Musi Banyuasin	5.000.000.000,00	Kesbangpol
	- Polres Musi Banyuasin (ETLE)	3.000.000.000,00	Dishub
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL	444.009.725.525,00	
5.2.1	Belanja Modal Tanah	13.560.615.000,00	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.726.312.638,00	
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.399.910.884,00	
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235.490.782.603,00	
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.832.104.400,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	
5.4	BELANJA TRANSFER	222.448.242.700,00	
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	222.448.242.700,00	
	Surplus/(Defisit)	110.838.249.703,00	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	140.838.249.703,00	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	24.000.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	26.000.000.000,00	
	- Perumda Air Minum Tirta Randik	15.000.000.000,00	
	- PT. Petro Muba Holding	5.000.000.000,00	
	- PT. Muba Energy Maju Berjaya	1.000.000.000,00	
	- PT. Bank Sumsel Babel	5.000.000.000,00	
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	90.838.249.703,00	
	Pembiayaan Netto	(110.838.249.703,00)	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	
TOTAL APBD		2.829.518.902.000,00	

Sumber : RKPD Tahun 2023



BAB VIII

PENUTUP

Fungsi dari dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak Eksekutif dan pihak Legislatif.

Dengan tersusunnya Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, Aamiin.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Sekayu, Juli 2022
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

H. APRIYADI